

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Tarif Multiguna yang ditetapkan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN) memang belum mengakomodir Asas Efisiensi di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik dari segi pandang Asas Efisiensi Alokatif yang dianggap belum terdapat keselarasan kombinasi yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya, begitupula Asas Efisiensi Produksi khususnya mengenai manajemen ketenaga kerjaan dan penambahan distribusi listrik dengan menambah pembangkit listrik untuk memenuhi unsur Efisiensi Produksi yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
- b. Tindakan yang dilakukan oleh PT.PLN melanggar hak konsumen untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen meskipun penerapannya didasarkan pada Keppres Nomor 104 tahun 2003 yang berisi penerapan tarif reguler dan tarif khusus.

4.2 Saran

- a. Asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Persaingan Usaha kiranya tidak perlu digunakan sepenuhnya didalam pertimbangan KPPU didalam memutus suatu perkara mengingat bahwa pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha disisipi oleh ide Kapitalisme yang tidak berpihak pada rakyat.

- b. Didalam penerapan Tarif Multiguna selain melihat sebuah kepentingan pelaku usaha, PT.PLN juga harus memperhatikan hak-hak konsumen yang ada di dalamnya sehingga tidak terjadi diskriminasi antara konsumen yang satu dengan yang lain. PT.PLN juga harus memperhatikan perkembangan global secara spesifik mengenai peningkatan kebutuhan pasar yang tidak hanya mencakup kebutuhan industri dan bisnis saja tetapi juga mencakup kebutuhan rumah tangga besar. Selain berguna untuk meningkatkan standart kualitas PT.PLN juga meningkatkan pelayanan terhadap konsumen di Indonesia.